

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara (penguasa) dan warganegara (rakyat), dan dalam hubungan antara sesama warganegara. HAM yang berisi hak-hak dasar manusia memuat standar normatif untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya dan hubungan rakyat dengan sesama rakyat. Oleh karena itu, penegakkan HAM mempunyai makna penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Ada dua makna yang terkandung dalam HAM; *pertama*, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. *Kedua*, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur (Chamim dkk, 2006:164-165).

Secara sederhana, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia, tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi

hidup dan kehidupan manusia, serta bersifat kodrati, yakni tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sebagai penyanggah dari hak tersebut.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia setidaknya memuat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan bagi HAM, yakni:

1. Hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat.
4. Hak untuk memeluk agama.
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Chamim dkk, 2006:177-178).

HAM mengalami perubahan yang signifikan pada amandemen kedua UUD 1945. Terutama pada pasal 28. Pasal 28 yang semula hanya mengatur tentang kemerdekaan berpendapat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan, diubah dan dirinci menjadi pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

Secara lebih rinci mengenai pengakuan dan jaminan HAM dalam UUD 1945 tersebut dielaborasi dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagai upaya untuk menegakkan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut, kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga

mengatur tentang adanya pengadilan HAM *ad hoc* yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki setiap orang sangat penting. Pengakuan bahwa adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Pengakuan bahwa HAM merupakan hak semua orang berarti mengakui adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Penelitian Nurma (2008) yang berjudul “Hak Asasi Manusia” menyimpulkan bahwa hak asasi setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu yang lain dan setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi akan diadili dalam peradilan HAM. Selain itu, penelitian Satria (2011) yang berjudul “Pendidikan Pancasila Hak Asasi Manusia Pekerja” memberikan kesimpulan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran HAM khususnya bagi para TKI (tenaga kerja Indonesia). Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan HAM sangat diperlukan untuk setiap warganegara. Melalui pendidikan HAM, setiap warganegara dapat mengetahui hak apa saja yang ia miliki begitu pula dengan kewajiban yang harus ia jalankan.

Pendidikan HAM ditransformasikan di sekolah-sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk

melahirkan generasi muda dan masyarakat luas untuk mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyada dkk, 2003:17-18). Aktualisasi demokrasi merupakan muara dari pendidikan HAM tersebut, yaitu terciptanya pelaksanaan HAM yang seimbang dan selaras antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warganegara. Kenyataan tersebut pada akhirnya dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang demokratis yang di dalamnya terdapat sikap saling menghormati hak asasi yang dimiliki setiap anggota masyarakat, sehingga konsep masyarakat madani dapat tercipta.

Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAM. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan. Melalui pendidikan HAM diharapkan agar HAM menjadi bagian yang terintegrasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pendidikan berbasis HAM sudah seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran untuk dapat diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang relevan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi serta dapat menjadi warganegara yang baik.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan materi yang terkandung dalam kurikulumnya diharapkan mampu memberikan

kesadaran dalam diri siswa untuk patuh dan taat terhadap negara. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan memuat aspek-aspek yang dapat memberikan pedoman terhadap siswa, supaya memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu materi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yakni hak asasi manusia yang meliputi materi menghargai keputusan bersama. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri peserta didik akan hak dan kewajibannya sehingga kehidupan yang demokratis dapat terwujud. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menghargai keputusan bersama merupakan hak asasi manusia salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana amanat kurikulum harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural, khususnya sebagai warganegara yang sadar hak dan kewajibannya. Sekolah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, merupakan sarana yang ideal bagi pemerintah untuk mensosialisasikan pendidikan HAM di kalangan generasi penerus bangsa. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan penanaman akan pentingnya penegakkan HAM.

Pelaksanaan pendidikan HAM pada peserta didik, khususnya di Sekolah Dasar (SD), selain dipengaruhi oleh guru sebagai penyampai materi, juga ditentukan oleh muatan dalam buku ajar yang menjadi pedoman peserta

didik dalam mempelajari pelaksanaan HAM, misalnya muatan materi-materi yang berkaitan dengan HAM yaitu menghargai keputusan bersama, dan lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang pelaksanaan HAM. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarga-negaraan di sekolah merupakan salah satu sarana penanaman nilai-nilai HAM.

Buku ajar sebagai sumber pembelajaran merupakan komponen penting di sekolah, kualitasnya tidak boleh diabaikan karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Kualitas buku ajar dapat dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku, dan kesesuaian materi dengan kurikulum. Kualitas buku ajar yang telah diterbitkan, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Faktor penulis buku, kemampuan penulis yang meliputi penguasaan materi dan kemampuan menguraikan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang buku ajar.
2. Faktor kepentingan penerbit, kondisi fisik buku, dengan tebal tipisnya buku, akan mempengaruhi biaya produksi seperti proses percetakan dan penghematan bahan-bahan sehingga akan mempengaruhi cakupan isi materi dalam buku ajar.
3. Faktor muatan kurikulum, seharusnya dalam menyusun buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi karena dipengaruhi oleh dua faktor penulis dan penerbit maka muatan buku bisa kurang sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan (<http://etd.eprints.ums.ac.id>).

Kutipan di atas menegaskan bahwa kualitas buku ajar dapat ditinjau dari segi kesesuaian dengan kurikulum, isi, materi dan kejelasannya.

Pada kenyataannya terdapat buku yang dapat dikatakan kurang berkualitas. Penelitian Rosita (2011) yang berjudul “Analisis Buku Teks Mata Pelajaran PKn Kelas II Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa buku teks mata

pelajaran Pkn kelas II SD kurang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, penelitian Nurdiansyah (2011) yang berjudul “Analisis Buku Ajar PKn Kelas V Sekolah Dasar” menyimpulkan materi dalam buku ajar kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum KTSP. Baru-baru ini juga terdapat kasus buku ajar siswa kelas dalam bentuk LKS (lembar kerja siswa) kelas II SD yang menghebohkan dan membuat khawatir para orang tua siswa. Banyak Pihak menilai tidak layak kalimat istri simpanan, tertulis dalam cerita berjudul *Bang Maman dari Kali Pasir* pada buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta halaman 30-31, yang menjadi buku pelajaran siswa kelas 2 SD yang usianya baru menginjak 7-8 tahun (<http://www.solopos.com>). Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, buku ajar disusun untuk membantu siswa dalam mempelajari materi setiap pelajaran. Buku ajar yang baik harus sesuai dengan kurikulum. Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun berdasarkan kurikulum memuat materi tentang Menghargai Keputusan Bersama yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pendidikan HAM. Pada kenyataannya tidak semua materi yang ada dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan kepada siswa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian guna meneliti “Analisi Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan HAM dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas V Karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati Widiastuti Di SD Negeri Cakraningratan Tahun 2012/2013”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini, adalah mengenai Analisis Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan HAM dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati Widiastuti Di SD Negeri Cakraningratan Tahun 2012/2013, akhir selanjutnya dari fokus penelitian yang dirinci menjadi 2 subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati Widiastuti yang digunakan di kelas V SD Negeri Cakraningratan Tahun Pelajaran 2012/2013?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V di SD Negeri Cakraningratan Tahun Pelajaran 2012/2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan muatan materi dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati Widiastuti



yang digunakan di kelas V SD Negeri Cakraningratan Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V di SD Negeri Cakraningratan Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan pemikiran dan deskripsi baru kepada pendidikan, yaitu untuk sumbangan konsep mengenai pengembangan materi dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan untuk pengembangan konsep mengenai pelaksanaan pendidikan HAM dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Siswa

- 1) Diharapkan dapat memperbaiki dan memahami pelaksanaan HAM dengan baik

- 2) Siswa dalam melaksanakan HAM pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih baik, efektif, dan efisien.

b. Bagi Guru

- 1) Sebagai pedoman dalam menjelaskan materi dan pelaksanaan HAM dengan baik
- 2) Masukan untuk perbaikan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan mengenai materi Menghargai Keputusan Bersama dan pelaksanaan HAM.

c. Bagi Sekolah

- 1) Sebagai informasi bagi sekolah (kepala sekolah) dalam pelaksanaan HAM dengan baik
- 2) Sebagai pedoman kepala sekolah untuk meningkatkan mutu baik dari peserta didik maupun tenaga pendidik mengenai pelaksanaan HAM yang benar.

## **E. Penegasan Istilah**

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Muatan Materi**

Muatan adalah kandungan/isi (Balai Pustaka). Materi diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan

sebagainya (Balai Pustaka). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa muatan materi adalah kandungan dari sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dan dibicarakan.

## 2. Pelaksanaan Pendidikan

Pelaksanaan adalah proses, cara, maupun perbuatan melaksanakan sesuatu (Balai Pustaka). Pendidikan adalah “suatu kompleks perbuatan yang sistematis untuk membimbing anak menuju pada pencapaian tujuan pendidikan (Muhammadiyah University Press)”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan pelaksanaan pendidikan merupakan upaya dalam membimbing peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

## 3. HAM

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara (Prenada Media). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

## 4. Buku Ajar

Buku ajar adalah “buku yang berisikan informasi yang dipakai sebagai panduan dalam melaksanakan sesuatu (Balai Pustaka)”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku ajar adalah buku panduan yang

berisikan informasi yang dipakai sebagai salah satu bahan dalam proses pembelajaran.